



**Pertemuan Awal Masa Transisi
Sekretariat Bersama BLKB
dengan Pemda Papua Barat**

Perubahan Sistem

Tarif Masuk Wisata Raja Ampat

**INOVASI – Program Hibah Konservasi
Bentang Laut Kepala Burung**

Teman-teman Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) yang kami hormati, merupakan kehormatan bagi saya untuk mengantarkan Bird's Head Seascape News yang kedua ini. Semoga semua informasi yang ada di dalam media ini berguna untuk kita bersama.

Pada edisi kedua ini Anda bisa membaca kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para mitra konservasi di BLKB diantaranya adalah pertemuan awal masa transisi Sekretariat Bersama BLKB dengan Pemda Papua Barat, perubahan sistem tarif masuk wisata Raja Ampat, tentang Program INOVASI sebuah program hibah Konservasi Bentang Laut Kepala Burung, serta cerita-cerita menarik lainnya.

Namun, pada kesempatan ini izinkan juga saya untuk mengucapkan salam perpisahan karena di pertengahan bulan April saya akan melanjutkan langkah serta karya di tempat yang lain.

Terima kasih yang luar biasa besar untuk kerjasama yang telah terjalin selama ini, untuk bantuan dan dukungannya bagi kemajuan Sekretariat Bersama BLKB.

Tidak ada kata lain, selain bekerja keras, bekerja keras dan bekerja keras untuk tetap terjaganya alam di sekitar kita. Semoga terus berkelanjutan semua karya kita untuk masyarakat luas.

Selamat membaca,

Shita Prativi
Manajer Sekretariat Bersama BLKB

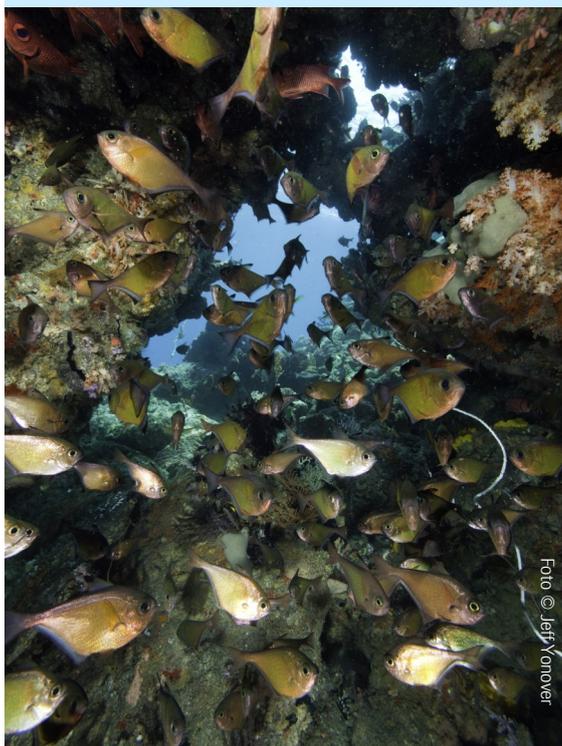


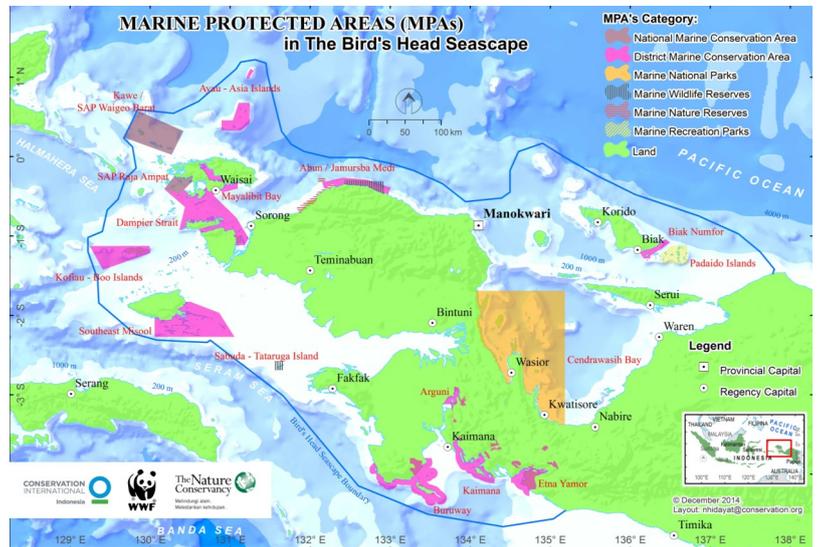
Foto © Jeff Vornover

Sekilas Inisiatif BLKB

Inisiatif Bird's Head Seascape atau dalam Bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) dimulai pada tahun 2005 untuk mencari keseimbangan antara melindungi sumberdaya alam yang kaya dan memastikan rakyat tetap mendapatkan manfaat dari sumberdaya yang ada. Sebuah kemitraan yang kuat, yang didukung dana terbesar dari Walton Family Foundation untuk mencapai sukses dan belum pernah terjadi sebelumnya antara tiga LSM internasional yaitu Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), dan WWF (World Wildlife Fund) Indonesia dengan pemerintah lokal, provinsi dan nasional, masyarakat pesisir, universitas, dan organisasi lokal menyediakan sebuah landasan dimana pembangunan berkelanjutan dapat dicapai.

Pusat dari inisiatif yang ambisius ini adalah pembentukan dan implementasi dari jejaring multi pemanfaatan yang secara ekologis terhubung dan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) yang tangguh, didukung dan terintegrasi dalam peraturan lokal dan nasional, serta dikelola bersama oleh instansi pemerintah dan masyarakat lokal. KKP yang dideklarasikan secara lokal ini berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk mengelola KKP-nya sendiri, dan memperkuat hak ulayat darat dan laut. Pengelolaan dan rencana zonasi memasukkan teori pengelolaan perikanan yang maju sekaligus juga menghidupkan kembali sistem pengelolaan sumber daya alam tradisional Papua, seperti tradisi 'sasi' dan mendorong mereka untuk menjaga kebudayaan lokalnya.

Upaya-upaya tim BLKB dan mitra kami diarahkan menuju penguatan implementasi secara langsung di Bentang Laut dan mendukung kebijakan lintas sektoral, tata pemerintahan, pendidikan, pemantauan, dan inisiatif pembiayaan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dari BLKB.***



Upaya-upaya tim BLKB dan mitra kami diarahkan menuju penguatan implementasi secara langsung di Bentang Laut dan mendukung kebijakan lintas sektoral, tata pemerintahan, pendidikan, pemantauan, dan inisiatif pembiayaan untuk memastikan masa depan yang berkelanjutan dari BLKB.

Pertemuan Awal Masa Transisi Sekretariat Bersama BLKB dengan Pemda Papua Barat

Sekretariat Bersama Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar pertemuan awal masa transisi pada tanggal 11-12 Februari 2015 di Hotel Aston Niu, Manokwari. Acara ini diikuti oleh jejaring konservasi BLKB dari Conservation International (CI), The Nature Conservancy (TNC), World Wildlife Fund (WWF), Universitas Papua (UNIPA), Starling Resources, Yayasan Kalabia, Yayasan Penyu Papua, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat, BBKSDA Provinsi Papua barat, Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih, dan Pemerintah Provinsi Papua Barat.

“Pertemuan hari ini merupakan pertemuan awal antara Pemda Papua Barat dengan lembaga-lembaga tersebut di bawah koordinasi Sekretariat Bersama BLKB dalam rangka memasuki masa transisi kerjasama tahun 2014 – 2017. Oleh karena itu, pertemuan ini sangat penting dan kami selaku Gubernur Papua Barat sangat mendukung pertemuan ini, guna tercapainya pembangunan sumber daya alam berbasis konservasi pada Bentang Laut Kepala Burung, yang tentunya akan mendukung pencapaian kemakmuran masyarakat di sekitar Bentang Laut Kepala Burung, sekaligus mendukung pengendalian dan pengawasan pengelolaannya untuk mempertahankan kelestarian kekayaan sumber daya alam,” kata Gubernur Papua Barat Abraham O. Atururi dalam pidato pembukaan acara.

Sepanjang hampir sepuluh tahun perjalanan, dalam bidang peningkatan kapasitas, kerjasama dengan lembaga-lembaga ini, pemerintah daerah telah menghasilkan sejumlah tenaga lapangan dalam pengelolaan kawasan konservasi termasuk pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas (BLUD UPTD) Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, yang merupakan BLUD UPTD pertama di Indonesia untuk pengelolaan kawasan konservasi yang memungkinkan tenaga non PNS dari masyarakat yang sudah dilatih duduk bersama dalam satu struktur dengan pemerintah daerah dalam mengelola kawasannya.

Di bidang penegakan hukum, kerjasama ini telah mendorong pemerintah daerah Raja Ampat untuk membuat peraturan pelarangan penangkapan hiu dan manta di seluruh perairannya yang menjadikan Raja Ampat sebagai kabupaten pertama di Indonesia yang memberikan perlindungan secara penuh kepada biota tersebut yang kemudian menginspirasi pembuatan peraturan ini di tingkat nasional dan menjadikan Indonesia mendapatkan banyak apresiasi internasional. Kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian dengan Universitas Negeri Papua, telah menjadikan UNIPA sebuah universitas yang memiliki fasilitas dan keahlian di bidang genetika kelautan dengan adanya laboratorium genetiknya dan saat ini sedang membangun *Centre of Excellence*, sebuah pusat keahlian kelautan dan pengelolaan konservasi kelautan. Jejaring konservasi BLKB juga mendukung terbentuknya jejaring 15 Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di seluruh perairan Papua Barat dengan total 3.6 juta hektar dan dapat dikelola dengan baik.***

(Teks dan foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)



Pertemuan Lanjutan Pembahasan Pendanaan Berkelanjutan BLKB

Sebagai lanjutan dari pertemuan tanggal 11 dan 12 Februari lalu, maka pada tanggal 18 Maret, Sekretariat Bersama Bentang Laut Kepala Burung bersama Pemda Papua Barat menggelar pertemuan yang membahas pendanaan berkelanjutan pengelolaan konservasi pada wilayah Bentang Laut Kepala Burung. Pertemuan ini dilaksanakan di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si.

Pertemuan ini membahas langkah-langkah detail pasti ke depan, yang berkaitan dengan pembentukan *trust fund* (dana perwalian) juga termasuk tentang pengelolaan, mekanisme, serta struktur dari lembaga yang akan dibentuk nantinya. Pertemuan juga telah sepakat untuk mengadakan pertemuan rutin setiap bulan guna menjawab salah satu pekerjaan rumah dalam pengelolaan wilayah konservasi yaitu pendanaan yang berkelanjutan pengelolaan konservasi pada wilayah Bentang Laut Kepala Burung.

Pertemuan berhasil membahas pentingnya penyiapan dana dari PEMDA Provinsi Papua Barat sebagai dana awal *trust fund* (dana Perwalian) BLKB. Pemda Provinsi Papua Barat mempunyai 2 peluang untuk pembentukan dana awal trust fund, yaitu: (1) DAU dari APBD Papua Barat dan (2) "Dana Abadi" sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang OTSUS. Kedua hal tersebut akan dibahas lebih rinci dalam pertemuan bulan April 2015.*** (Henny Widayanti/CI)



Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat, Drs. Nataniel D. Mandacan, M.Si. memimpin pertemuan yang membahas pendanaan yang berkelanjutan pengelolaan konservasi pada wilayah Bentang Laut Kepala Burung di Ruang Pertemuan Kantor Gubernur Papua Barat di Manokwari (18/3).

Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC

Menuju Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi



Abraham O. Atururi
(Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

“ Kami selaku Gubernur Papua Barat sangat mendukung kegiatan jejaring konservasi Bentang Laut Kepala Burung. Kegiatan konservasi yang telah dilaksanakan selama 10 tahun terakhir ini sangat penting guna mendukung pengendalian serta pengawasan pengelolaan sumber daya alam secara bijak, lestari, dan berkelanjutan. Hal ini selaras dengan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan Provinsi Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi. Untuk menuju terwujudnya Papua Barat sebagai Provinsi Konservasi diperlukan peran aktif semua pihak.”

Abraham O. Atururi
(Gubernur Papua Barat)

Pengukuran Karbon di Kawasan Hutan Bakau Kaimana

Pada bulan Februari 2015, tim yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Kaimana, Universitas Negeri Papua (UNIPA), Kementerian Kelautan dan Perikanan, Conservation International (CI), dan University of Queensland telah melakukan survei pengukuran karbon hutan bakau yang pertama kalinya di Provinsi Papua Barat. Wilayah Papua sendiri menyimpan 50% dari total keseluruhan luas kawasan mangrove di Indonesia yang mencapai 4 juta hektar.

Survei dilakukan di wilayah Kawasan Konservasi Perairan dengan mengukur kandungan karbon yang ada. Ekosistem hutan bakau mampu menyimpan karbon dalam jumlah besar. Pohon bakau dapat menyimpan sampai dengan enam kali lipat karbon yang setara dengan luas hutan tropis, yang artinya bahwa kegiatan konservasi hutan bakau adalah sangat penting untuk mengurangi emisi karbon secara global.

Sebagai tambahan, pohon bakau di wilayah Papua telah menyediakan keuntungan mata pencaharian bagi masyarakat. Pohon bakau membantu nelayan lokal untuk melakukan pembibitan dan daerah untuk perlindungan spesies perikanan laut, serta memberikan perlindungan terhadap masyarakat pesisir dari badai ombak dan gelombang pasang surut.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada kita, maka program di Kaimana akan memberikan dukungan kepada nelayan kepiting pohon bakau yang sangat bergantung kepada pohon bakau yang sehat. Nelayan akan bekerja bersama pemerintah daerah setempat untuk mengembangkan sistem patroli lokal untuk mencegah hilangnya habitat hutan bakau. Program ini terlaksana atas dukungan GDF-Suez. *** (Matt Fox/Conservation International)



Kegiatan pengukuran karbon di kawasan hutan bakau di Kaimana.
Foto: Jennifer Howard/Conservation International

CI dan Mitra Mendukung Nelayan di Pesisir Kaimana

Untuk mendukung kegiatan konservasi yang berdampak luas dan signifikan bagi keanekaragaman hayati laut, Kawasan Konservasi perairan di Bentang Laut Kepala Burung didesain untuk mendukung para nelayan lokal. Hingga 80% luas wilayah di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dikelola untuk keberlanjutan perikanan bagi masyarakat lokal. Masyarakat pesisir di Kaimana hampir seluruhnya bergantung kepada perikanan. Berkaitan dengan hal tersebut Conservation International (CI) Program Kaimana meluncurkan dua program perikanan di Kaimana bersama dengan Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) dan RARE.

CI bersama MDPI saat ini mendukung nelayan kepiting hutan bakau di KKP Arguni dalam sebuah program peningkatan nelayan. Program ini memungkinkan nelayan dan pelaku pasar untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan rantai persediaan. Program ini juga akan mendukung kegiatan monitoring ketersediaan kepiting dan membantu nelayan untuk mengelola dan membuat peraturan untuk meningkatkan keberlanjutan persediaan kepiting. MDPI adalah mitra baru di wilayah Bentang Laut Kepala Burung, yang dibentuk oleh Anova untuk mendukung nelayan lokal meningkatkan keberlanjutan serta meningkatkan keuntungan bagi perikanan berskala kecil. MDPI juga telah sukses bermitra dengan Fair Trade Amerika Serikat dimana mereka telah mencapai kesepakatan untuk mendapatkan harga yang tinggi bagi hasil yang diperoleh nelayan ikan tuna.

Selain kerjasama dengan MDPI, saat CI juga bermitra dengan RARE untuk program baru *Fish Forever* di Kaimana. Program ini akan membantu para nelayan ikan kakap merah di Distrik Buruway. Kelompok nelayan akan mencatat banyaknya hasil tangkapan untuk menyelaraskan dengan pengaturan zonasi dalam KKP yang bertujuan untuk memastikan produktivitas dalam jangka panjang serta menjaga fungsi-fungsi ekologis yang penting di KKP. Kaimana adalah salah satu wilayah perikanan yang cukup kaya di Indonesia namun tekanan terhadapnya meningkat seiring dengan meningkatnya penangkapan ikan di wilayah ini.***

(Teks dan foto: Matt Fox/Conservation International)



Kepiting hutan bakau.

Perubahan Sistem Tarif Masuk Wisata Raja Ampat

Mulai 1 Januari 2015, sistem tarif masuk wisata Raja Ampat telah berubah nama menjadi Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan berdasarkan Perbup No 18 Tahun 2014.

Jasa Lingkungan adalah jasa yang diberikan oleh fungsi ekosistem alam maupun buatan yang nilai dan manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun tidak langsung oleh para pemangku kepentingan dalam rangka membantu memelihara dan/atau meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan.

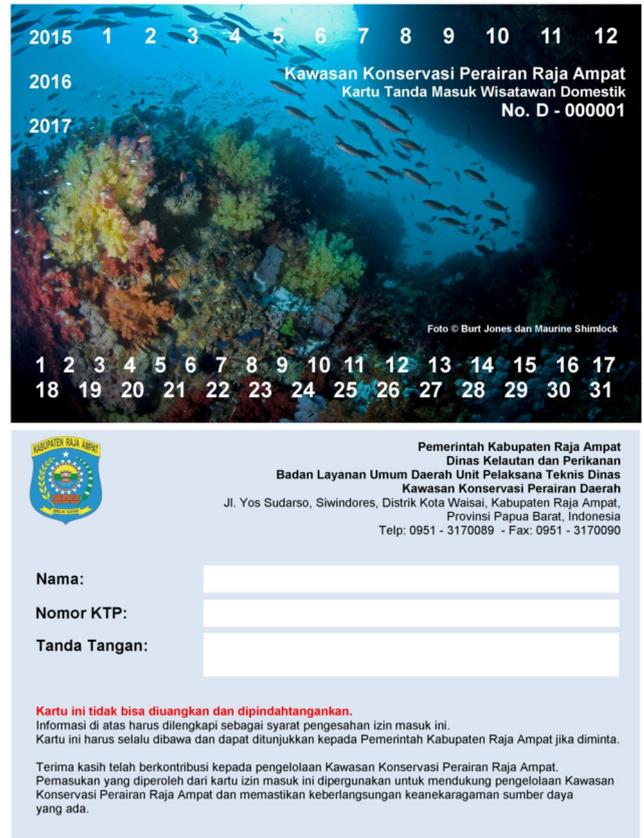
Layanan pemeliharaan jasa lingkungan kawasan konservasi perairan Raja Ampat adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui UPTD KKP Raja Ampat Dinas Perikanan dan Kelautan, bekerjasama dengan pemangku kepentingan lain seperti masyarakat adat dan lembaga non pemerintah, untuk memastikan ekosistem di kawasan konservasi perairan kepulauan Raja Ampat tetap dapat mempertahankan fungsinya dan menyediakan jasa lingkungan yang diperlukan bagi kehidupan.

Upaya-upaya yang dilakukan antara lain pengaturan zonasi kawasan, pengawasan (patroli) zonasi, pe-ningkatan kesadaran masyarakat untuk konservasi, mendorong kegiatan pariwisata berkelanjutan dan peningkatan manfaat ekonomi konservasi bagi masyarakat lokal. Upaya-upaya ini membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh kemampuan pendanaan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Oleh karena itu untuk memastikan kelangsungan hidup ekosistem kawasan konservasi laut Kabupaten Raja Ampat, maka diberlakukan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan kawasan konservasi perairan Raja Ampat melalui Perbup No 18 Tahun 2014.

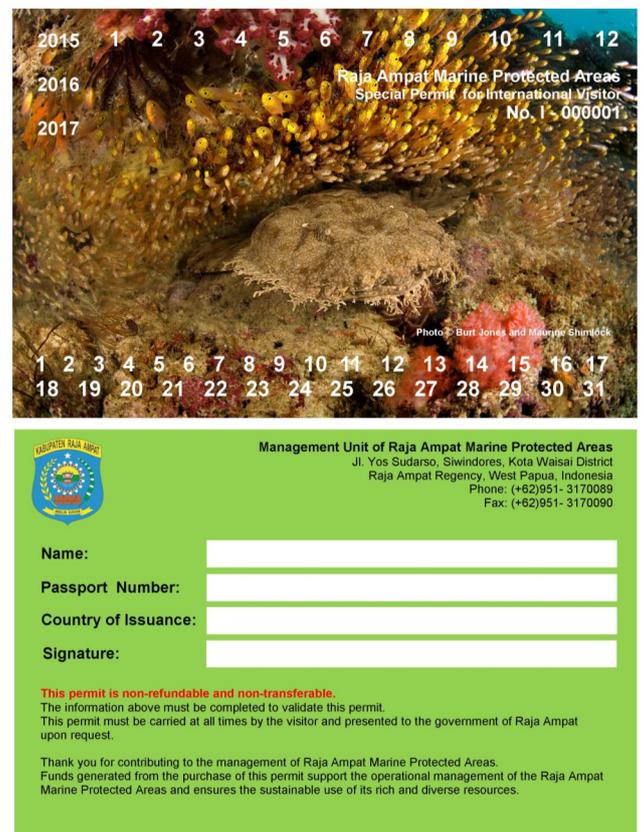
Dulunya tarif layanan ini disebut Tarif Masuk Wisata Raja Ampat. Untuk tarif yang baru, bagi turis domestik adalah Rp. 500.000,- dan untuk turis asing adalah Rp. 1.000.000,-. Untuk bukti masuk baru berbentuk kartu plastik berlaku satu tahun sejak tanggal pembelian.

Pemasukan yang diperoleh dari kartu ini dipergunakan untuk mendukung pengelolaan kawasan konservasi Raja Ampat dan memastikan keberlangsungan keanekaragaman sumber daya yang ada.***

Kemana Uang Anda Pergi?



Kartu untuk wisatawan domestik.



Kartu untuk wisatawan asing.

Peluncuran BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat

Kabupaten Raja Ampat memandang penting untuk mengelola kawasan konservasi secara profesional dan berkelanjutan demi kelestarian alam di sekitarnya. Upaya ini telah dimulai dengan dirintisnya Unit Pelaksana Teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah (UPTD KKP) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Raja Ampat

Salah satu strategi untuk memastikan keberlanjutan pendanaan kawasan konservasi perairan di Raja Ampat, UPTD KKP Raja Ampat menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan- Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dengan status BLUD bertahap berdasarkan Surat Keputusan Bupati Raja Ampat Nomor 61 Tahun 2014. Ini merupakan yang pertama dan satu-satunya kawasan konservasi di Indonesia yang menerapkan PPK-BLUD.

Terkait dengan hal tersebut, pada (2/2) lalu bertempat di Ruang Rapat Kantor Bupati Raja Ampat, telah dilaksanakan acara peluncuran BLUD UPTD Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Acara ini dipimpin oleh Wakil Bupati Raja Ampat Inda Arfan. Acara tersebut dihadiri oleh para pemangku kepentingan terkait, perwakilan tokoh adat, serta organisasi mitra Pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam kegiatan konservasi selama ini yaitu CI, TNC, dan Starling Resources. Wakil Bupati Raja Ampat menaruh harapan besar kepada BLUD UPTD.

“Dengan mekanisme keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Pemerintah Kabupaten Raja Ampat melalui UPTD KKP Raja Ampat akan memastikan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang efektif, efisien, dan profesional untuk menjamin kelestarian dan kepuasan wisatawan menikmati keindahan alam kawasan konservasi perairan Raja Ampat,” kata Wakil Bupati Raja Ampat Inda Arfan dalam pidatonya. Dengan diluncurkannya BLUD UPTD Kawasan Perairan Daerah Raja Ampat ini menandai era baru pengelolaan kawasan konservasi di Raja Ampat.***

(Teks dan foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)



Wakil Bupati Raja Ampat Inda Arfan memakaikan seragam kepada perwakilan staf BLUD UPTD KKP Raja Ampat sebagai simbol pengelola kawasan konservasi yang baru.



Wakil Bupati Raja Ampat Inda Arfan bersama perwakilan staf BLUD UPTD KKP Raja Ampat dan pemangku kepentingan terkait.

Sosialisasi Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan kepada Perusahaan Operator Liveboard

Pada tanggal 25 Februari 2015, bertempat di Hotel Swiss Bel Sanur, Bali, BLUD UPTD KKP Raja Ampat bersama Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar sosialisasi terkait Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan kepada perusahaan operator *liveboard* (kapal wisata). Acara tersebut dihadiri oleh Bupati Raja Ampat Marcus Wanma, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kab. Raja Ampat Manuel Urbinas, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Raja Ampat Yusdi Lamatenggo, Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kab. Raja Ampat Yan Mambrasar, Kepala Dinas Perhubungan Kab. Raja Ampat Becky Rahawarin, Kepala BLUD UPTD KKP Raja Ampat Adrianus Kaiba, lembaga mitra konservasi CI, TNC, Starling Resources, dan 40 perusahaan operator *liveboard*.

Para peserta sosialisasi mendukung penuh kebijakan Pemerintah Raja Ampat ini dan berharap dengan adanya Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan dapat memastikan pengelolaan kawasan konservasi perairan yang

efektif, efisien dan profesional yang menjamin kelestarian dan kepuasan wisatawan menikmati keindahan alam kawasan konservasi perairan Raja Ampat. ***

(Teks dan foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)



Bupati Raja Ampat Marcus Wanma memimpin sosialisasi terkait Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan kepada perusahaan operator *liveboard*.



Pantai Dusner.

Teluk Cenderawasih, Antara Hukum Adat dan Hukum Modern

Salah satu resolusi saya ditahun 2015 adalah terus mendampingi masyarakat dalam segala kegiatan konservasi, sehingga keterlibatan publik tentang isu konservasi akan terus meningkat. Dalam hal ini, akhirnya saya sadar bahwa hukum adat sangatlah penting dalam kehidupan masyarakat Papua.

Selepas bekerja di kantor, saya berkendara ke sekitar area pelabuhan yang menjadi lokasi anak muda Wasior biasa nongkrong dan menanti senja. Pemandangan indah matahari terbenam di balik Gunung Wamesa kali itu terganggu dikala mata saya tertuju pada bayangan tanah di sebagian tanjung yang telah dipotong sehingga terlihat seperti sepotong roti coklat raksasa di atas lautan.

Pembukaan lahan di seberang itu sudah lama mengganggu pikiran saya. Tepat di sana terjadi pembukaan lahan oleh sebuah perusahaan kayu sejak 2 tahun terakhir, tepatnya di sekitar Kampung Dusner, salah satu kampung yang terletak di Kabupaten Teluk Wondama di Distrik Kuri Wamesa. Kampung Dusner kini terbagi menjadi 2 yakni Kampung Mandarisi dan Siwo Sawo.

Di Kampung Dusner ini, WWF Indonesia bekerjasama dengan Balai Besar Taman Nasional Teluk Cenderawasih (BBTNTC) telah melakukan sosialisasi zonasi dan penyadartahuan tentang pengelolaan lingkungan secara lestari. Dengan Kapal Gurano Bintang, kami secara rutin menandangi desa-desa di sekitar TNTC untuk memberikan pengetahuan dan pendidikan mengenai konservasi lingkungan serta fasilitas-fasilitas kesehatan sederhana.

Kembali ke Jalan yang Beradat

Beberapa bulan lalu, kami dari pihak WWF Indonesia diundang oleh Lembaga Masyarakat Adat Nusantara (LMAN) untuk menghadiri sidang adat gugatan salah satu marga di Kampung Dusner terkait kegiatan reklamasi pantai yang dilakukan perusahaan kayu tersebut. Akhirnya setelah sekian lama, kesempatan memberikan sentakan manis ke pemilik hak ulayat tersebut datang juga.

Diskusi panjang pada persidangan sangat penuh perdebatan terkait silsilah tanah tersebut yang tidak berujung pada satu kesepakatan. Walau ada satu dari tetua yang berusaha menengahkan, namun perdebatan terus terjadi sampai pada usulan untuk melakukan upacara "Belah Bambu".

Belah bambu merupakan salah satu cara penyelesaian masalah kuno disaat tidak mendapatkan hasil yang mufakat, upacara ini dipercaya untuk menentukan siapa yang salah dan siapa pihak yang benar. Prosesi sakral ini dilakukan melalui doa-doa leluhur dan sangat penting bagi masyarakat adat karena beresiko kematian pada pihak yang ditetapkan salah.

Ketua LMAN di akhir persidangan memberikan penjelasan tentang konservasi dan memberikan kesempatan kedua belah pihak marga untuk berunding agar tidak secara gegabah melakukan prosesi adat. Saya juga menitipkan beberapa dokumen kepada ketua LMAN mengenai konservasi sebagai acuan dalam diskusi selanjutnya.

LMAN juga berpendapat bahwa tanah adat adalah hak penuh masyarakat adat sehingga aturan pemerintah dan aturan modern lainnya akan dibahas setelahnya. Pada sidang terakhir saya juga mengantongi aturan konservasi no 5 tahun 1990 dengan melingkari pasal 19 dan buku zonasi TNTC sebagai senjata saya mengemukakan pendapat kepada para tetua adat.

Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa sekuat apapun aturan pemerintah atau modern lainnya, jika tidak sesuai dengan keinginan masyarakat maka akan sulit diberlakukan. Aturan modern sangat perlu diintegrasikan dalam aturan adat dan pentingnya keberadaan seorang tetua adat yang mengerti tentang aturan konservasi, sehingga melalui beliau aturan modern dapat sejalan dengan pola dan kebiasaan masyarakat adat yang sudah turun temurun.

Semoga dengan adanya diskusi ini, saat saya kembali ke pelabuhan itu tidak ada lagi pemandangan yang menyerupai roti coklat raksasa, melainkan sudah terganti dengan hamparan hijau yang luas di atas lautan biru.***

(Teks dan Foto: Feronika Manohas/WWF-Indonesia)



Suasana sidang adat.

Mengenal Konservasi Penyu Belimbing di Abun

Perlindungan habitat penyu dilakukan secara lebih luas dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah yang merupakan salah satu strategi dalam pelestarian penyu di Indonesia oleh WWF. Upaya Konservasi penyu belimbing telah dilakukan sejak tahun 1982 dengan mendorong keluarnya SK penunjukkan Jamursba Medi sebagai Cagar Alam oleh Menteri Pertanian Nomor 820/Kpts/Um/11/1982 tanggal 10 November 1982, selanjutnya dirubah menjadi Suaka Margasatwa melalui SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 891/kpts-II/1999 dengan luasan 278,25 Ha.

Sejak saat itu WWF bekerjasama dengan masyarakat lokal sebagai *local patroller* terus melakukan kegiatan monitoring intensif untuk melindungi penyu dan habitatnya. Hal ini berdampak pada menurunnya eksploitasi terhadap penyu dan teluranya. Selanjutnya pada tahun 2005, WWF mendorong Kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Abun berdasarkan SK Bupati Kabupaten Sorong No. 142 tahun 2005 dan memiliki luas wilayah sekitar 26.972,968 ha.

Seiring terbentuknya Pemerintahan Kabupaten Tambrau menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau Di Provinsi Papua Barat, maka saat ini kawasan masuk dalam wilayah Kabupaten Tambrau. Upaya WWF melibatkan Pemerintah Tambrau dalam pengelolaan pantai peneluran terus dilakukan sehingga pada tahun 2012 dibentuklah Forum Kolaborasi pengelolaan Kawasan Esensial Pantai peneluran penyu belimbing Jamursba Medi dan sekitarnya, dengan SK Bupati nomor 54 tahun 2012 yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tambrau. Melalui Forum ini pada tahun 2013, Bupati Tambrau mencadangkan Kawasan Konservasi Taman Pesisir Pantai peneluran penyu Jamursba Medi dan laut sekitarnya.

Disamping itu WWF juga ingin memastikan perlindungan habitat dengan melakukan pendampingan kepada Kelompok Masyarakat dan Pemerintah Daerah melalui pengembangan zonasi pada Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD), rencana pengelolaan (*management plan*) serta kelembagaan pengelolanya.

Upaya lain dalam pengembangan kesadaran masyarakat yaitu telah memfasilitasi guru-guru lokal dalam pendidikan lingkungan hidup dengan menyusun buku Modul muatan lokal "mengenal pesisir dan laut" untuk sekolah dasar dan penyuluhan kesehatan lingkungan bagi siswa/siswi di tingkat pendidikan dasar.

WWF juga bekerja mendukung mitra-mitra terkait seperti UNIPA, kelompok masyarakat, dan LSM lain yang memiliki tujuan perlindungan penyu belimbing dan habitatnya serta pengembangan ekonomi masyarakat.***
(Imam Syuhada/WWF-Indonesia)



(Foto: WWF-Indonesia)



(Foto: WWF-Indonesia)



(Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

Memasukkan Sasi ke dalam Zonasi

Stilah 'sasi' dikenal di Indonesia bagian Timur, khususnya di Maluku dan Papua. Sasi adalah praktik pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan oleh masyarakat adat dengan penutupan pemanfaatan sumber daya dan wilayah untuk jangka waktu tertentu. Prosesi buka dan tutup sasi dilakukan dengan upacara adat. Denda atau sanksi terhadap pelaku pelanggaran ditentukan oleh para tokoh adat. Praktik ini efektif karena tingkat kepatuhan masyarakat lebih tinggi dibandingkan kepatuhan terhadap hukum positif atau aturan formal.

Dalam 3-4 tahun terakhir, masyarakat di Raja Ampat kembali aktif menerapkan sasi karena sudah merasakan manfaatnya. Tahun 2013 lalu pada satu minggu masa buka sasi, masyarakat Kampung Saleo dan Salpele di KKPD Wayag mendapatkan hasil panen senilai lebih dari 200 juta rupiah dari biota teripang, lola dan lobster. Sementara itu di Raja Ampat bagian Selatan, dalam empat malam panen sasi di bulan Juni 2013 masyarakat kampung Folley yang termasuk dalam Kawasan Konservasi Perairan daerah (KKPD) Misool mendapatkan lebih dari 1.300 ekor teripang senilai lebih dari 100 juta rupiah. Keuntungan-keuntungan tersebut membuat masyarakat bertambah semangat untuk menerapkan aturan dan membuat sasi-sasi yang baru. Sampai saat ini setidaknya terdapat 27 lokasi sasi di Raja Ampat dengan total luas lebih dari 20.000 hektar.

Penyusunan zonasi jejaring kawasan konservasi Raja Ampat tidak hanya mementingkan pertimbangan ilmiah terutama keseimbangan faktor biofisik, tetapi juga melibatkan masyarakat setempat. Aspek sosial menjadi penting dalam penyusunan zonasi karena mayoritas penduduk bergantung pada sumber daya laut. Masyarakat terlibat secara aktif dalam patroli dan pengawasan terhadap setiap penggunaan sumber daya di dalam kawasan konservasi. Masyarakat juga terlibat dalam sosialisasi sistem zonasi baik secara internal maupun kepada pengguna sumber daya yang berasal dari luar Raja Ampat. Hasilnya, kepatuhan pengguna sumber daya terhadap sistem zonasi meningkat. Sebagai contoh di Kofiau, tingkat penangkapan di zona terlarang menurun menjadi hanya 2% pada tahun 2013 dari sebelumnya 12% pada tahun 2011 ketika sistem zonasi pertama kali disepakati.

Persentase pelanggaran oleh nelayan luar juga menurun menjadi kurang dari 20% pada tahun 2013 setelah sebelumnya mencapai lebih dari 40% di tahun 2011. Hasil panen sasi terhadap beberapa biota seperti teripang, lobster, dan lola (jenis kerang) juga mengalami peningkatan. Kawasan yang menerapkan sasi selama 2 tahun terbukti mampu meningkatkan biomassa dan kepadatan ikan baronang, lentjan, dan kakatua, bahkan ikan kerapu. Hal ini mengindikasikan bahwa memasukkan sasi ke dalam sistem zonasi dapat meningkatkan ketahanan pangan masyarakat di dalam jejaring kawasan konservasi di Raja Ampat. Penggunaan sasi dapat diperkuat dan dilindungi aturan formal pemerintah, merupakan cara yang tepat untuk melibatkan masyarakat dalam kegiatan konservasi. *** (Purwanto/The Nature Conservancy)



(Foto: Nugroho Arif Prabowo/TNC)

INOVASI – Program Hibah Konservasi Bentang Laut Kepala Burung

Dalam satu dekade terakhir, program Inisiatif BLKB telah membangun jejaring tingkat provinsi untuk area konservasi kelautan di zona pesisir Papua Barat yang melibatkan kemitraan antara organisasi internasional seperti CI, WWF, TNC, pemerintah provinsi dan daerah Papua Barat, serta masyarakat lokal. Prinsip dasar dari kerja jejaring ini adalah program pemerintah guna pembentukan area perlindungan kawasan kelautan (marine protected areas / MPA) di wilayah BLKB yang sampai saat ini telah melingkupi keberadaan 15 Kawasan Konservasi Perairan seluas total 3,567,525 Ha.

Bentang Laut Kepala Burung (The Bird's Head Seascape / BHS) atau BLKB yang terletak di provinsi Papua Barat, Indonesia merupakan jantung keanekaragaman hayati kelautan; dibandingkan kawasan lainnya dengan ukuran yang sama diseluruh dunia. Kawasan konservasi seluas 3,400,000 Ha ini menduduki peringkat tertinggi dalam jumlah dan jenis terumbu karang. BLKB adalah habitat terpenting untuk beragam jenis spesies laut seperti penyu, hiu dan mamalia laut, yang terancam kepunahan dalam skala global. Selain nilai penting pada tataran internasional, keberadaan ekosistem di BLKB yang terjaga keberlanjutannya juga merupakan suatu hal yang mendasar bagi ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat lokal mengingat tingkat kehidupan masyarakat Papua Barat yang mayoritas masih berada di bawah garis kemiskinan juga telah menciptakan ketergantungan yang tinggi dari masyarakat pesisir atas keberadaan sumber daya laut untuk konsumsi dan mata pencaharian.

Guna mendukung masyarakat dan organisasi lokal dalam melakukan upaya konservasi kawasan kelautan yang berkesinambungan di wilayah BLKB, pada 2015 - 2017 program konservasi BLKB akan menyediakan pendanaan senilai maksimal Rp. 220.000.000,- bagi proyek yang dinilai relevan dengan usaha konservasi kawasan kelautan pada tingkat masyarakat.

Program Dana Hibah INOVASI ini ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat lokal dalam upaya konservasi. Penyediaan dukungan atas pendanaan dan pengelolaan proyek bagi masyarakat sipil ini diharapkan dapat memfasilitasi peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat Papua Barat secara lebih luas dalam konservasi lingkungan hidup di kawasan Bentang Laut Kepala Burung. Proyek yang diajukan harus berfokus pada usaha konservasi kawasan kelautan dan pesisir di Papua Barat, serta memiliki sasaran yang bertujuan pada upaya – upaya pemeliharaan lingkungan habitat dan keberadaan spesies laut di wilayah tersebut, penguatan tata kelola perikanan, peningkatan kapasitas konservasi, atau pendekatan inovatif guna pelibatan kemitraan baru dalam usaha konservasi.

Melalui penyediaan dua jenis pendanaan hibah skala kecil (hingga Rp 55.000.000,-) dan skala menengah (Rp 55.000.000,- – Rp 220.000.000,-), INOVASI mengajak organisasi lokal non-pemerintah, kelompok masyarakat, pengusaha skala kecil menengah, serta anggota masyarakat sipil lainnya untuk terlibat dalam upaya lokal konservasi laut dan pengelolaan sumber daya kelautan yang inovatif dan berkelanjutan. Proposal kerja yang diajukan akan dinilai kelayakannya berdasarkan kesesuaian dengan tujuan keseluruhan program Bentang Laut Kepala Burung (BLKB) yaitu konservasi wilayah laut dan pesisir Papua Barat, perlindungan spesies dan habitat, penguatan manajemen perikanan, pembangunan kapasitas lokal untuk upaya konservasi, pengadaan mitra baru serta pendekatan konservasi yang inovatif. Program Hibah Konservasi BLKB juga mendorong partisipasi dan keterlibatan kelompok perempuan dalam proses pengajuan proposal dan pelaksanaan program.

Melalui mekanisme fasilitasi hibah, penyediaan dana bagi upaya konservasi berbasis masyarakat ini diharapkan dapat menyodorkan beragam pilihan bagi keberhasilan upaya konservasi menggunakan pendekatan yang meliputi langkah – langkah inovatif serta pengetahuan tradisional untuk pemeliharaan lingkungan hidup, yang akan dapat diberlakukan di kawasan lainnya di BHS Papua Barat juga wilayah lainnya. Pengajuan proposal ditutup tanggal 30 Juni 2015.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini dapat menghubungi:

Henny Widayanti
Conservation International Indonesia
Kantor Sekretariat BLKB
Jl. Transito No.56 Wosi, Manokwari - Papua Barat
Email : hwidayanti@conservation.org
Hp : 081344022715

Pendidikan Lingkungan Hidup bagi Anak-Anak

Perairan Raja Ampat yang kaya menyediakan sumber kehidupan dan mata pencaharian bagi lebih dari 40.000 penduduk yang tersebar di 135 desa, sekaligus menyediakan perlindungan dan membantu menyangga masyarakat dari serangan badai tropis. Masyarakat lokal di Raja Ampat mempunyai kaitan budaya dan hak kepemilikan tradisional yang kuat atas wilayah baik darat maupun laut. Kerangka hukum sudah mencatumkan mandat perlindungan jangka panjang dan pengelolaan kepulauan ini.

Sayangnya, sumber daya alam yang sangat penting tersebut juga menghadapi banyak ancaman. Praktik-praktik perikanan yang merusak dan tangkap-lebih, pembangunan pesisir yang tidak ramah lingkungan, penebangan kayu ilegal serta kegiatan pertambangan menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan laut Raja Ampat.

Pada kondisi ini, mengenalkan upaya untuk menjaga lingkungan sejak dini kepada anak-anak melalui pendidikan lingkungan hidup menjadi penting. Pendekatan dalam pendidikan lingkungan hidup yang mengintegrasikan beberapa cabang ilmu mengenai perikehidupan manusia serta kaitannya dengan berbagai aspek lingkungan masyarakat akan menjadikan mereka memiliki kemampuan untuk melakukan analisa mengenai permasalahan lingkungan yang aktual di sekitar mereka serta memahami tentang cara mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia secara baik dan berkelanjutan.

Sejak April 2007, The Nature Conservancy (TNC) Program Raja Ampat telah mengembangkan program Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) yang fokus pada pengembangan kurikulum muatan lokal di sekolah dasar khusus pada kelas IV dan V di wilayah Misool dan Kofiau atau sering disebut juga dengan PLH formal dan secara resmi masuk dalam buku daftar nilai siswa. Setelah melalui serangkaian lokakarya, maka selanjutnya pada guru diberikan tanggung jawab untuk melakukan uji coba dokumen muatan lokal PLH yang sudah disusun oleh mereka sendiri.

"Di tangan anak-anak inilah masa depan alam ini. Saya percaya bahwa jika sejak kecil mereka telah kita ajarkan tentang pentingnya menjaga kelestarian alam, maka hal ini tentu akan berpengaruh terhadap perilaku mereka nantinya untuk selalu menjaga alam ini, sehingga senantiasa lestari. Disinilah pentingnya pendidikan lingkungan hidup. Pendidikan lingkungan hidup yang dikembangkan oleh TNC telah mendorong dan menginspirasi anak-anak untuk ikut menjaga kelestarian alam khususnya laut, tempat dimana masyarakat disini menggantungkan kehidupannya," kata Nixon Watem, penggerak pendidikan lingkungan hidup di Kofiau, Kabupaten Raja Ampat.***

(Teks dan Foto: Nugroho Arif Prabowo/The Nature Conservancy)



Newsletter ini diterbitkan oleh Sekretariat Bentang Laut Kepala Burung
Jl. Transito no. 56, Wosi, Manokwari 98312, Papua Barat.

Kontak:

- Henny Widayanti, E-mail: hwidayanti@conservation.org
- Nugroho Arif Prabowo, E-mail: nprabowo@tnc.org

www.birdsheadseascape.com

CONSERVATION
INTERNATIONAL
Indonesia



The Nature
Conservancy
Melindungi alam.
Melestarikan kehidupan.



BENTANG LAUT KEPALA BURUNG, PAPUA